

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2020/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA MAGELANG
UNIT KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP
SUB UNIT KERJA : SEKRETARIAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : OT ROSTRIANTO
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 722970

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 750.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m2/175 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah Seluas 155 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 413.000.000

1. MOTOR, HONDA D1B02N26L2 A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER 1.5L SPORT (4X2) Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
3. MOBIL, HONDA BRIO SATYA DD1 1.2 E MT CKD Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
4. MOTOR, YAMAHA 2DP-R A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 27.000.000
5. MOTOR, HONDA D1B02N26L2 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 10.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 11.113.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 1.184.113.000**III. HUTANG** Rp. 230.000.000



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

954.113.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **23 Juni 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.